



Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Temanggung

LAPORAN AKHIR

INDIKATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG



**PENYUSUNAN ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan analisis indikator kinerja daerah dalam rangka penguatan performa Pemerintah Daerah pada kegiatan pembangunan di Kabupaten Temanggung

Laporan Antara ini disusun di bawah Kegiatan Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung, bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro (P5 Undip).

September, 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Bekerjasama dengan



PUSAT PELAYANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS DIPONEGORO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan optimalisasi kinerja layanan publik serta pengurangan potensi dan dampak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) merupakan fokus Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pemerintahan sesuai Permenpan RB No.26 Tahun 2020. Guna mencapai tujuan tersebut Pemerintah Republik Indonesia melalui Perpres No.29 Tahun 2014 mengeluarkan pedoman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai panduan penerapan pemerintahan yang baik, sesuai dengan amanat otonomi daerah dan upaya reformasi birokrasi. Penyusunan laporan dan evaluasi pembangunan merupakan salah satu bentuk upaya tersebut sesuai PP No 13 Tahun 2019. Indikator kinerja utama merupakan salah instrumen evaluasi pembangunan yang dapat digunakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran Indikator Kinerja Utama juga merupakan bagian dari arsitektur kinerja pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017.

Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 ini dilakukan untuk *me-review* hasil kajian serupa di tahun 2022 lalu, yakni Kajian Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah (IKUPD). Namun pada tahun ini Indikator yang dihitung adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Pemilihan tersebut didasari oleh acuan rencana pembangunan Kabupaten Temanggung yang berlaku dan telah diperbarui pada tahun 2020-2021 lalu, yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 dimana terdapat 53 indikator sasaran pembangunan daerah.

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas penilaian terhadap keselarasan rencana dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan rencana diidentifikasi melalui integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar dokumen perencanaan pembangunan. Adapun kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur melalui sub variabel transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini mengacu pada Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dan Adaptasi Definisi dan komponen Perumusan Perencanaan Pembangunan Nasional dari PP No 08 Tahun 2008.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, yang menekankan pada pelibatan berbagai aktor lokal, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Pendekatan partisipatif ini utamanya dilakukan pada kegiatan survei primer maupun FGD. Kajian ini berupa Riset Aksi (*action riset*) yang di dalamnya terdapat elaborasi antara kajian akademis ilmiah dengan kebutuhan pembangunan, kesiapan stakeholder, dan kapasitas sumber daya eksisting. Esensi dari pelaksanaan kajian ini merupakan kegiatan evaluasi *ex-ante*, yakni evaluasi yang dilakukan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Mengacu pada Gambar G-B.5 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017, kegiatan penilaian indikator kinerja ini dilakukan pada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*). Indikator keluaran berisi analisis penilaian terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selanjutnya, pada indikator hasil fokus pada penilaian capaian dan manfaat dari program/kegiatan yang dilaksanakan menurut perspektif masyarakat.

Kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dan tindak lanjut terhadap nilai yang ada. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Temanggung terutama bagi Perangkat Daerah sehingga dapat

menghasilkan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu rekomendasi dari kegiatan ini juga dapat meningkatkan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah dirumuskan pada RPJMD.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Isu Pembangunan	2
1.3. Tujuan dan Sasaran	3
1.4. Lingkup Kegiatan	3
1.4.1. Lingkup Obyek Kegiatan	3
1.4.2. Lingkup Materi Kegiatan.....	4
1.5. Hasil Kegiatan	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	5
2. Tinjauan Kembali Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; indeks perencanaan pembangunan daerah	7
2.1. Latar Belakang dan Justifikasi Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.....	7
2.2. Gambaran Sekilas Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) Kabupaten Temanggung 2022.....	8
2.2.1. Review Terhadap Pelaksanaan Kajian IKUPD Kabupaten Temanggung 2022	8
2.2.2. Review Terhadap Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	8
2.2.3. Review Terhadap Rekomendasi Hasil Kajian IKUPD Kabupaten Temanggung 2022; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	9
3. Metode Pengukuran dan Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan pembangunan Daerah	10
3.1. Konsep Pendekatan	10
3.2. Konsep Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	11
3.2.1. Kriteria Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD).....	12
3.3. Metode Analisis	21
3.4. Metode Survei dan Desain Survei Pengukuran dan Penilaian IKUPD	22
3.4.1. Metode Pengumpulan Data	22
3.4.2. Populasi dan Sampel	22
3.4.3. Survei pengumpulan data sekunder: informasi penyusun data dasar, serta Identifikasi pelaksanaan program/kegiatan PD, target, dan capaian	23
3.4.4. Survei pengumpulan data primer: data penunjang perumusan data dasar dan penilaian variabel kinerja pada indikator <i>output</i> dan <i>outcome</i>	25

3.4.5. Metode Pengukuran Hasil Survei	30
3.4.6. Kompilasi dan Verifikasi Hasil Survei	31
4. Perhitungan Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.....	32
5. Review Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung	36
5.1. Review Pada Penilaian Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	36
5.2. Review Status Capaian Target dan Program/Kegiatan Pembangunan.....	38
6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	45
Daftar Pustaka	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Obyek Kegiatan	4
Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi, Indikator Tujuan, dan Indikator Sasaran Pada Indikator Terpilih.....	8
Tabel 3. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dinilai di Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	14
Tabel 4. Deskripsi Pengukuran Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	16
Tabel 5. Sampel Survei Primer Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	22
Tabel 6. Panduan Survei Pengumpulan Data Sekunder.....	24
Tabel 7. Panduan Survei Pengumpulan Data Primer	27
Tabel 8. Kriteria Indeks Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	31
Tabel 9 Hasil IPPN 2018.....	33
Tabel 10 Hasil Indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	33
Tabel 11 Review Status Capaian Target dan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2023	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	4
Gambar 2. Perkembangan Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung	9
Gambar 3. Posisi Evaluasi Dalam Kerangka Monitoring dan Evaluasi	10
Gambar 4. Konsep Penilaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung.....	12
Gambar 5 Kerangka IPPN	15
Gambar 6. Kerangka Alur Pengukuran Indeks	30
Gambar 7 Kerangka Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	32
Gambar 8 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	34
Gambar 9 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Per Jenis Responden	35
Gambar 10 Peta Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Per Kecamatan.....	35
Gambar 11. Perbandingan Penilaian pada Variabel Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	36
Gambar 12. Jawaban Responden Perwakilan Kecamatan	37
Gambar 13. Jawaban Responden Perwakilan Kelompok Bidang.....	37
Gambar 14. Jawaban Responden Perwakilan DPRD.....	38

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak otonomi daerah merupakan amanat percepatan pembangunan dan kemandirian daerah yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hak otonomi daerah kemudian juga ditunjang oleh upaya reformasi birokrasi sesuai Permenpan RB No.26 Tahun 2020 sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan optimalisasi kinerja layanan publik serta pengurangan potensi dan dampak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Guna mencapai tujuan tersebut Pemerintah Republik Indonesia melalui Perpres No.29 Tahun 2014 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pedoman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai panduan dalam penerapan pemerintahan yang baik, sesuai dengan amanat otonomi daerah dan upaya reformasi birokrasi. Secara umum SAKIP dirancang sebagai sistem penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja. Penyusunan laporan dan evaluasi pembangunan merupakan salah satu bentuk upaya tersebut sesuai PP No 13 Tahun 2019. Indikator kinerja utama merupakan salah instrumen evaluasi pembangunan yang dapat digunakan.

Sebagai tolok ukur kegiatan pembangunan dan pencapaian visi pembangunan terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan, salah satunya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada mencakup indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*).

Pengukuran Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari arsitektur kinerja pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran IKU Pembangunan Daerah merupakan upaya evaluasi terutama pada indikator *output* dan *outcome*. Berdasarkan hal tersebut IKU menilai manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu sebagai hasil dari *output* serta Produk/Barang/Jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan *input*.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upayanya untuk menerapkan *Good Governance* juga perlu mengukur indeks kinerja utama dalam kegiatan perencanaan. Dalam konteks ini perlu penggunaan indikator yang aplikatif sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan/program/kegiatan dari instansi pemerintah yang telah ditetapkan

dalam RPJMD Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Tujuan, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2019-2023, memiliki delapan indikator, antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator Kinerja Sasaran (IKS) dibentuk untuk melihat efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Saat ini, terdapat 52 IKS yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, termasuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi kunci. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga tercipta produk pembangunan yang tepat sasaran.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut perlu suatu pelaksanaan kajian untuk mengukur indeks perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Kebutuhan ini telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan sejak tahun 2021. Konsistensi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, membuat proses penilaian indeks kinerja utama pemerintah daerah ini dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, kegiatan Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah tahun 2023 ini dilakukan kembali. Kegiatan pada tahun ini difokuskan pada pembaruan data dan indeks penilaian, serta mengidentifikasi rekomendasi IKUPD tahun 2022 yang sudah ditindaklanjuti. Seperti kajian sebelumnya, Kajian ini juga diharapkan mampu merespon penilaian keberhasilan rencana pembangunan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung. Dengan demikian, hasilnya dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang relevan untuk mencapai tujuan *Good Governance* pada umumnya, dan pada khususnya untuk meningkatkan pembangunan Kabupaten Temanggung secara berkelanjutan.

Adapun laporan akhir ini disusun sebagai gambaran hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kabupaten Temanggung. Fokus laporan ini adalah penyampaian hasil perhitungan, rekomendasi, serta evaluasi terkait indeks perencanaan pembangunan daerah.

1.2. Isu Pembangunan

Indikator kinerja pada setiap instansi merupakan suatu bentuk penjabaran dari sasaran yang berkontribusi dalam ketercapaian visi misi organisasi yang tertuang kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), maupun Rencana Kerja yang telah ditetapkan di Kabupaten Temanggung. Terkait adanya perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, maka upaya penilaian indikator kinerja sangat diperlukan sebagai masukan untuk mengetahui tolok ukur capaian kerja Pemerintah sesuai dengan RPJMD dan rencana strategis yang terkait. Terdapat beberapa isu dan permasalahan terkait Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sesuai dengan muatan RPJMD, diantaranya adalah:

- 1) Belum optimalnya persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah yaitu sebesar 83,43 persen.

- 2) Perlunya peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan

Mengacu pada rekomendasi kajian IKUPD 2022, pada tahun ini juga akan dilihat perkembangan dan perubahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun ini, serta menghasilkan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan di tahun mendatang. Kegiatan IKUPD Kabupaten Temanggung 2023 berfokus pada keperluan tindak lanjut atas hasil IKUPD 2022, yang meliputi review terhadap permasalahan utama kinerja pembangunan daerah dan penilaian IKUPD 2022, review terhadap tindak lanjut rekomendasi program/kegiatan dan perbaikan terhadap teknis kegiatan, serta menjawab tantangan dan kebutuhan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan **Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah** pada indikator Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

1. Meninjau kembali (*review*) konsep penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD);
2. Mengumpulkan data penilaian variabel pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD);
3. Menghitung data penilaian indeks tahun 2023;
4. Menganalisis hasil penilaian indeks pada tiap indikator;
5. Melakukan *evaluasi* perubahan nilai pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
6. Melakukan *review* terkait kegiatan dan program pembangunan pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD);
7. Merumuskan rekomendasi program dan kegiatan PD dan tindak lanjut.

1.4. Lingkup Kegiatan

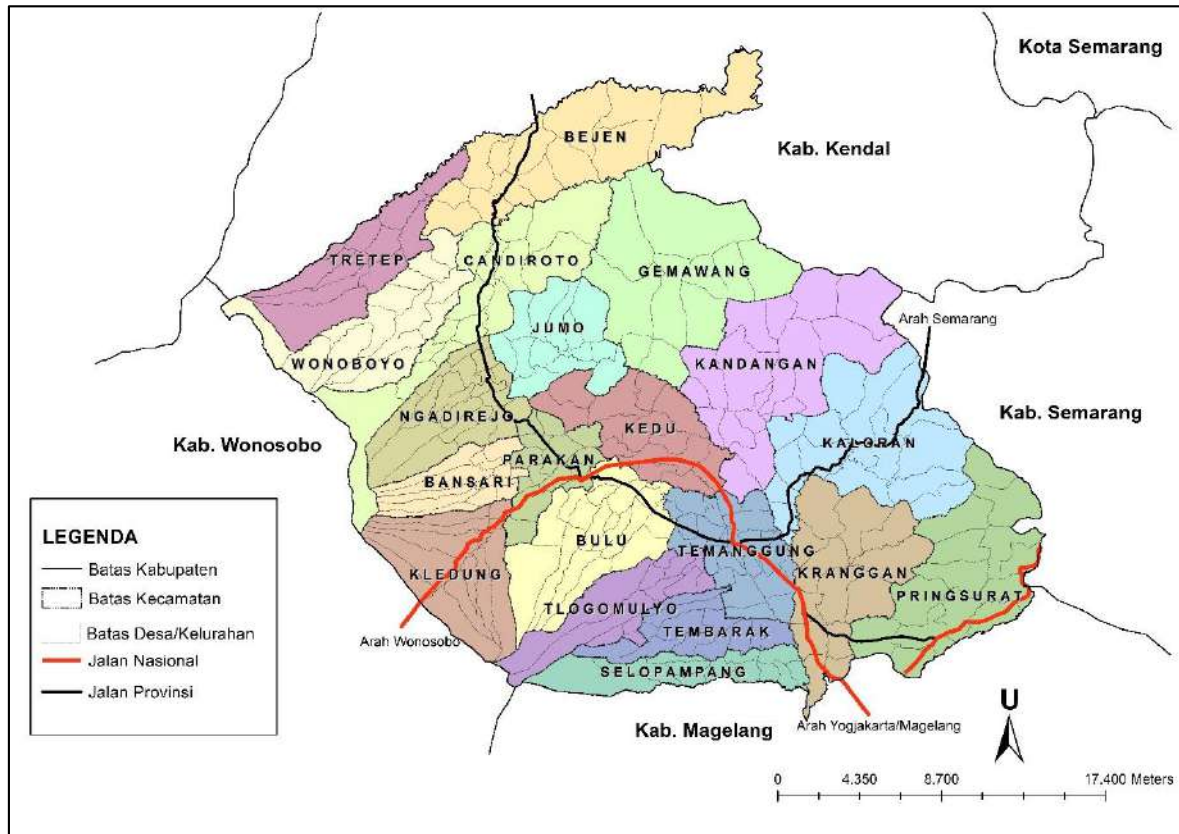
1.4.1. Lingkup Obyek Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada cakupan wilayah administratif Kabupaten Temanggung. Adapun penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah di wilayah Kabupaten Temanggung ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, materi dalam kegiatan ini berorientasi pada indikator hasil (*outcome*) untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung pada umumnya, serta berorientasi pada indikator keluaran (*output*) pada Organisasi Perangkat Daerah (PD) di dalamnya. Berdasar pada acuan tersebut, maka sasaran obyek pada kegiatan ini adalah:

Tabel 1. Sasaran Obyek Kegiatan

Sasaran Narasumber	Fungsi/Peran	Sasaran Informasi
Pemerintah Kab. Temanggung (dan PD di dalamnya)	Pelaksana program/ kegiatan (<i>enabler</i>)	Justifikasi untuk indikator keluaran (<i>output</i>)
Masyarakat Kabupaten Temanggung	penerima manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan (<i>beneficiaries</i>)	Justifikasi untuk indikator hasil (<i>outcome</i>)

Sumber: Analisis penyusun, 2023



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung tahun 2016, dimodifikasi oleh tim penyusun, 2023.

Gambar 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Obyek kegiatan dari sisi Pemerintah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Adapun obyek kegiatan untuk responden Masyarakat meliputi masyarakat penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan, pada konteks ini diarahkan pada responden adalah yang paham dan kritis terhadap proses pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Responden Masyarakat ini difokuskan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) yang mengikuti musrenbang, Kelompok Bidang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.4.2. Lingkup Materi Kegiatan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, cakupan materi dalam kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Indikator kinerja mencakup indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung pada umumnya, serta berorientasi pada indikator keluaran (*output*) pada Organisasi Perangkat Daerah (PD) di dalamnya. Cakupan materi yang dibahas, baik

pada indikator hasil maupun indikator keluaran, adalah ditinjau dari tinjauan dan variabel Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun data yang digunakan dibatasi pada hasil pengukuran IKU pada data pada tahun 2022 hingga 2023. Materi yang terkait langsung dengan penilaian kinerja adalah pelaksanaan program/kegiatan, sebagai catatan terhadap hasil penilaian IKUPD yang dihasilkan. Materi di dalamnya juga memperhatikan aspek keberhasilan pelaksanaan, potensi kendala, hambatan, maupun informasi lainnya yang terkait.

1.5. Hasil Kegiatan

Pada dasarnya kegiatan ini menghasilkan enam keluaran utama, yakni:

1. Definisi, ukuran, dan kriteria yang kontekstual dengan kondisi lokal wilayah Kabupaten Temanggung, serta dipakai sebagai acuan dalam menyusun data penilaian indeks kinerja utama;
2. Data penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2023
3. Hasil Analisis Capaian; yang berisi Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, yang di dalamnya mencakup indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome)
4. Evaluasi Perubahan Nilai; yang berisi Hasil evaluasi perubahan nilai dari indeks terkait yang telah dibandingkan dengan nilai pada tahun 2021 dan 2022
5. *Review* Kegiatan & Program Pembangunan
6. Rekomendasi Kegiatan Pembangunan dan Tindak Lanjut.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan untuk laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bagian ini akan membahas latar belakang penelitian laporan ini, isu pembangunan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, hasil kegiatan dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan ini.

2. Tinjauan Kembali Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian kedua membahas justifikasi dan urgensi pelaksanaan kegiatan pengukuran IKUPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 serta gambaran sekilas pelaksanaan kegiatan pengukuran di tahun lalu. Gambaran sekilas tersebut mencakup review terhadap kegiatan, nilai yang dimiliki serta rekomendasi yang diberikan.

3. Metode Pengukuran dan Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ketiga membahas mengenai justifikasi dalam melakukan penilaian indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah, konsep penilaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kriteria pada setiap indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Kondisi Eksisting Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian keempat membahas kondisi eksisting Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), baik kondisi pada level nasional hingga daerah serta perkembangan pengukurannya.

5. Review Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada bagian ini membahas perkembangan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sejak awal pengukuran pada tahun 2021 hingga saat ini. Review juga dilakukan pada masing-masing responden.

6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Bagian ini mencakup rekomendasi teknis untuk peningkatan nilai indeks perencanaan pembangunan daerah yang berasal dari kuesioner *output* dari perangkat daerah. Bagian ini juga mencakup rekomendasi teknis yang dihasilkan berdasar hasil kajian yang dilakukan.

TINJAUAN KEMBALI KAJIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG; INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Latar Belakang dan Justifikasi Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 ini dilakukan untuk *me-review* hasil kajian serupa di tahun 2022 lalu, yakni Kajian Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah (IKUPD). Namun Kajian IKUPD tahun 2023 ini khusus dilakukan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah didasari oleh acuan rencana pembangunan Kabupaten Temanggung yang berlaku dan telah diperbarui pada tahun 2020-2021 lalu, yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023.

Adapun RPJMD 2018-2023 disusun berdasarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Temanggung dan mengakomodir isu-isu strategis yang ada sehingga indikator-indikator terpilih tersebut merupakan representasi dari capaian pembangunan yang diharapkan. Secara umum arah pembangunan Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan berfokus pada poros visi "***Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem***" dan misi yang dilakukan untuk mewujudkannya antara lain adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya.
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang lebih operasional untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Implementasi dari masing-masing tujuan dan sasaran ini diukur menggunakan indikator tujuan dan indikator sasaran yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Terdapat 53 indikator sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023. Adapun pada kegiatan ini berfokus pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kajian IKUPD tahun 2023 ini kemudian dilakukan untuk mengukur keberhasilan program pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 serta sebagai *review* terhadap program terkait sesuai dengan hasil pengukuran pada tahun sebelumnya. Keterkaitan visi, misi, serta tujuan dan sasaran terhadap kedelapan indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi, Indikator Tujuan, dan Indikator Sasaran Pada Indikator Terpilih

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang
Tujuan Misi ke-3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran ke-1: Meningkatkan kualitas manajemen Pemerintahan	Indikator Sasaran ke-32: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung, 2021

2.2. Gambaran Sekilas Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) Kabupaten Temanggung 2022

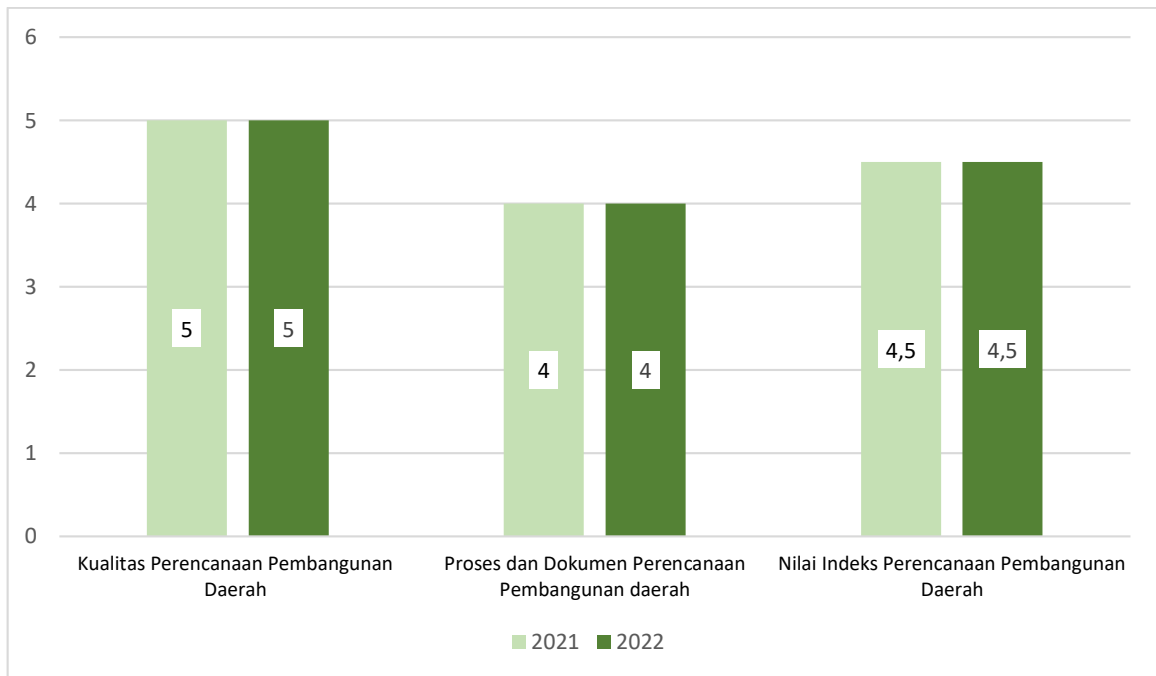
2.2.1. Review Terhadap Pelaksanaan Kajian IKUPD Kabupaten Temanggung 2022

Pada kajian IKUPD Kabupaten Temanggung tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi teknis untuk perbaikan di kegiatan IKUPD 2023. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada kajian IKUPD 2021 adalah keterbatasan data, perubahan sasaran responden survei (BPD/LPMK), adanya perubahan data yang signifikan, serta kesesuaian data dengan realita.

Penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung 2023 akan meninjau ulang sejauh mana tindak lanjut PD pemangku terhadap rekomendasi teknis yang terdapat pada IKUPD 2022, antara lain sosialisasi indeks sebagai bagian dari IKUPD kepada PD terkait, kesepakatan internalisasi usulan indeks serta capaian program dan kegiatan pada rencana kegiatan PD, inovasi kegiatan PD pemangku IKUPD dalam pencapaian target indeks setiap tahun, serta Perencanaan program anggaran dengan melibatkan anggaran yang lebih tepat dan inovatif (Dana Bantuan Pusat/Provinsi, Dana Desa, CSR dan dana Kerjasama lainnya).

2.2.2. Review Terhadap Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung pada indeks pembangunan pemuda, gotong royong, toleransi dan rasa aman sudah dilakukan sejak tahun 2019. Adapun indeks pembangunan kebudayaan, pembangunan olahraga, kemudahan berusaha, dan perencanaan pembangunan daerah baru dilakukan pada tahun 2021. Selama 2 tahun perhitungan indeks perencanaan pembangunan daerah tidak mengalami perubahan signifikan, dengan angka 4.5.



Gambar 2. Perkembangan Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung

Nilai sub variabel kualitas perencanaan pembangunan daerah sudah mencapai angka maksimal 5, dan dipertahankan selama masa perhitungan. Nilai tersebut berasal dari penilaian terhadap integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Adapun nilai sub variabel proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah 4 dan tetap selama masa perhitungan. Nilai tersebut berasal dari penilaian terhadap transparan, responsif, akuntabilitas, partisipatif, terukur, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dari proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2.2.3. Review Terhadap Rekomendasi Hasil Kajian IKUPD Kabupaten Temanggung 2022; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan guna mempertahankan nilai indikator yang sudah tinggi dan meningkatkan nilai indikator yang masih belum baik. Adapun rekomendasi tersebut antara lain adalah:

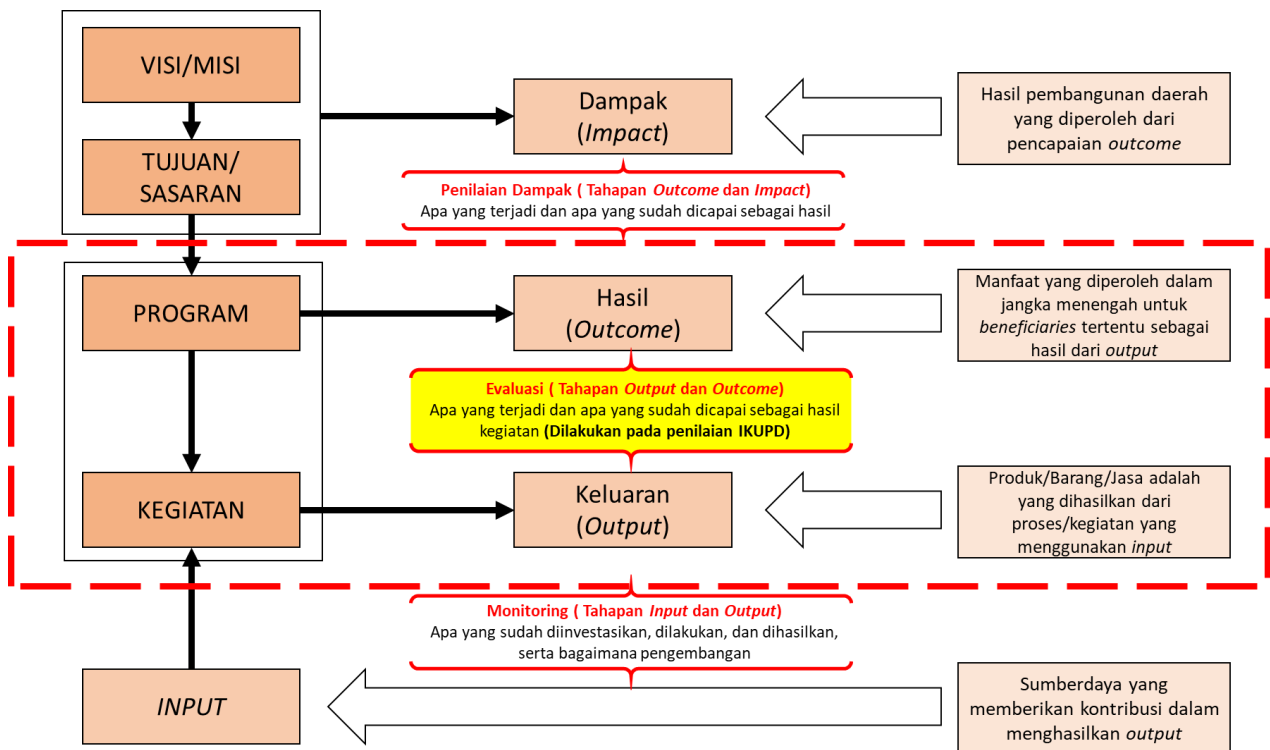
1. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online
2. Pemanfaatan Media Sosial sebagai sharing informasi perencanaan
3. Penguatan Pembangunan berbasis Penelitian dan Pengembangan agar efektif, efisien dan terukur

METODE PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG; INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Konsep Pendekatan

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, yang menekankan pada pelibatan berbagai aktor lokal, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Pendekatan partisipatif ini utamanya dilakukan pada kegiatan survei primer maupun FGD. Pendekatan partisipatif ini diambil karena konsep penilaian indikator kinerja utama, khususnya pada orientasi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) menekankan pada pemberdayaan sumber daya lokal, termasuk di dalamnya adalah aktor lokal.

Kajian ini berupa Riset Aksi (*action riset*) yang di dalamnya terdapat elaborasi antara kajian akademis ilmiah dengan kebutuhan pembangunan, kesiapan stakeholder, dan kapasitas sumber daya eksisting. Esensi dari pelaksanaan kajian ini merupakan kegiatan evaluasi *ex-ante*, yakni evaluasi yang dilakukan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Posisi kajian ini menurut acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017 adalah pada tahapan evaluasi arsitektur kinerja pembangunan daerah.



Gambar 3. Posisi Evaluasi Dalam Kerangka Monitoring dan Evaluasi

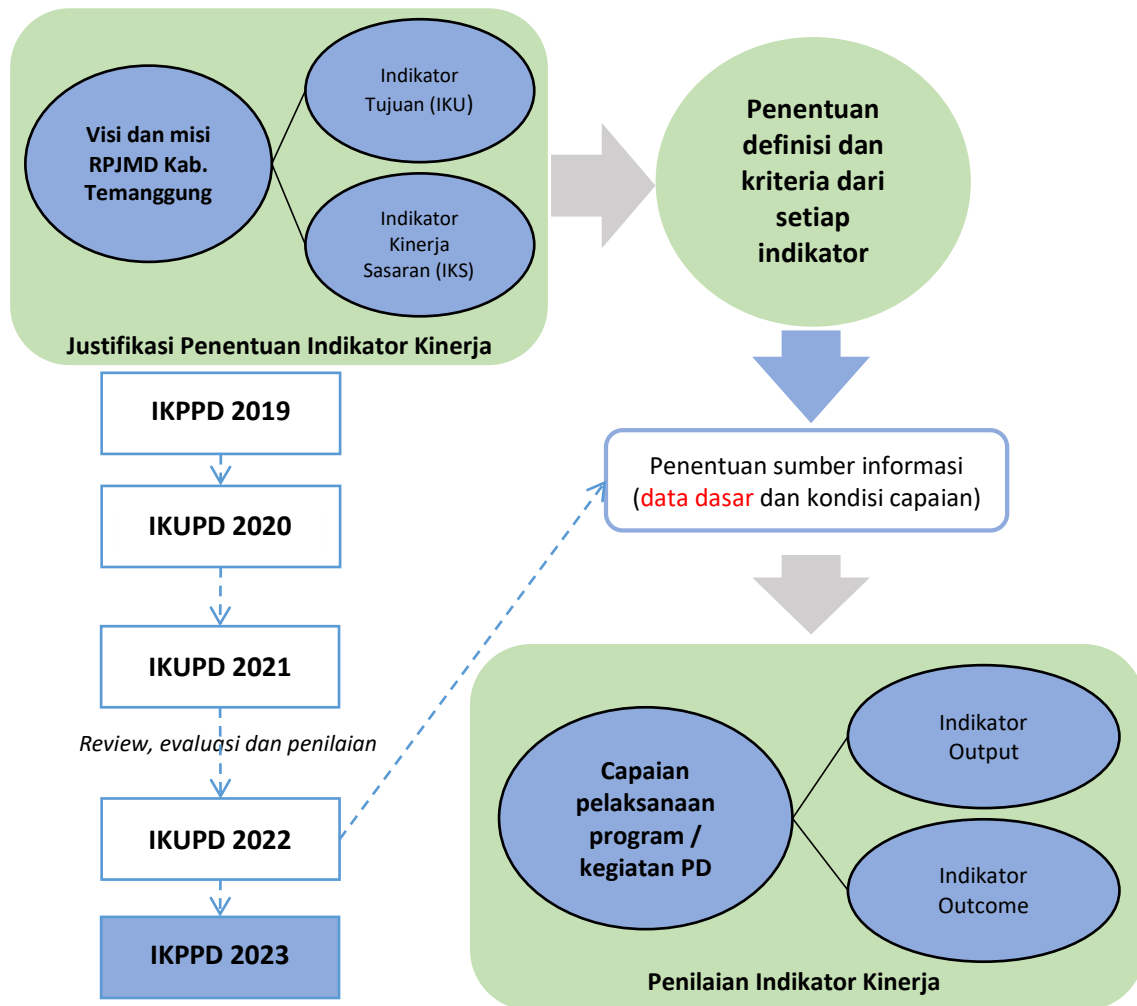
Mengacu pada Gambar G-B.5 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017, kegiatan penilaian indikator kinerja ini dilakukan pada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*), yang posisinya dapat dilihat pada gambar di atas. Indikator keluaran berisi analisis penilaian terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selanjutnya,

pada indikator hasil fokus pada penilaian capaian dan manfaat dari program/kegiatan yang dilaksanakan menurut perspektif masyarakat.

3.2. Konsep Penilaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsep penilaian indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah dilakukan dengan tiga tahapan analisis. Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan meninjau ulang definisi dan kriteria pada indeks perencanaan pembangunan daerah 2022 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya, kajian ini diawali dengan meninjau kembali konsep penilaian IKUPD 2022 yang menjadi data dasar (*baseline*). Harapannya adalah agar penyusunan kajian IKUPD tahun 2023 ini sejalan dengan *baseline* serta lebih baik dalam pelaksanaannya.

Tahapan selanjutnya adalah *me-review* informasi dasar yang digunakan dalam kajian IKUPD 2022 mengenai capaian pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh pemerintah. Informasi tersebut diperoleh dari dokumen perencanaan RPJMD, Renstra dan Renja PD pada tahun sebelumnya, serta hasil tindak lanjut rekomendasi kajian IKUPD 2022. Informasi yang didapatkan tersebut berupa *output* (keluaran) dari program kegiatan pemerintah dan juga *outcome* (dampak) yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program pemerintah yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan deskripsi tersebut diharapkan perhitungan indeks perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan IKUPD Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dan IKUPD tahun berikutnya akan dilaksanakan untuk mencapai keberlanjutan dalam peningkatan kinerja PD. Untuk lebih memahami alur penilaian tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber: Hasil Adaptasi dari Permen PAN No. 9 Tahun 2007

Gambar 4. Konsep Penilaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung

Setelah meninjau kembali (*review*) konsep penilaian indeks perencanaan pembangunan daerah, kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan data penilaian variabel pada tiap indikator terpilih. Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan pengumpulan data sekunder dan primer untuk diteruskan ke kegiatan berikutnya, yaitu perumusan dan rekapitulasi data penilaian IKUPD 2023. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) untuk verifikasi dan menggali masukan terhadap informasi penyusun data penilaian IKUPD 2023. Setelah seluruh data terkumpul, kegiatan berikutnya adalah analisis penilaian indeks pada tiap indikator IKUPD 2023 yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dan di-review dengan hasil kajian IKUPD 2022 dan 2021. Kegiatan terakhir adalah perumusan rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil kajian IKUPD Kabupaten Temanggung 2023.

3.2.1. Kriteria Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

Perencanaan Pembangunan penting dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan. Selain itu perencanaan yang baik merupakan perwujudan pemerintahan yang transparan sebagai ciri pemerintahan demokrasi. Pembagian kekuasaan

pemerintah pusat dan daerah juga membuat pentingnya adanya Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai komponen penting untuk diukur ketercapaiannya. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dilakukan sebagai upaya optimalisasi dan efektifitas penanganan permasalahan pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1) Perlunya mengoptimalkan integrasi sistem *e-planning* dan *e-budgetting*
- 2) Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu urgensi pengembangan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah untuk mewujudkan sistem perencanaan daerah yang terintegrasi, sinkron, sinergi dan memiliki kualitas yang baik dari persepsi masyarakat.

Secara umum, sistem perencanaan yang ada di Indonesia berada dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU No 25 Tahun 2004)”. Sedangkan

“Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (PP No 08 Tahun 2008)”.

Pada sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki tujuan yaitu:

- a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sedangkan pada Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tujuan:

- Mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Berdasarkan definisi normatif dan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dirumuskan menjadi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga menjadi IKU Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional tahun 2018. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional diukur berdasarkan tiga subvariabel yaitu Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas. Integrasi: Pemetaan Integrasi antara Program Daerah (Bidang) ke Program Prioritas, untuk kemudian Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas dan Renja; Sinkronisasi Dokumen Renja PD dan RKA PD; dan Integrasi antara program prioritas Nasional dan Daerah.

Ketiga sub variabel tersebut dioperasionalkan sesuai tupoksi kerja dan nomenklatur dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu, pada kajian ini juga mengadaptasi tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional melalui UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 sehingga terdapat sub variabel lain yang mengindikasikan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah. Dasar tersebut yang kemudian menjadi dasar penyusunan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kabupaten Temanggung. Pada IPPD ini terdapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pengampu utama dengan tupoksi sebagai berikut:

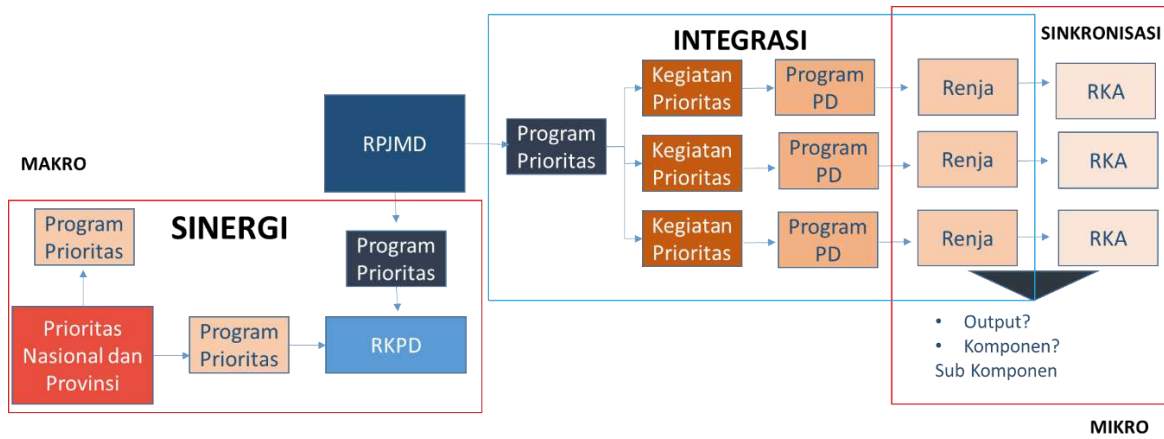
Tabel 3. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dinilai di Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

Nama PD	Tupoksi
<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>Tugas Pokok: Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; • pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; • pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; • pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; • pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya

Sumber: Renstra Institusi sesuai Perbup Temanggung

Terdapat tiga komponen utama pada pengukuran indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) di Kabupaten Temanggung yaitu Integrasi, Singkronisasi, dan Sinergi. Selain itu akan diukur juga komponen pendukung sebagai bagian dari penjaminan kualitas perencanaan pembangunan daerah menurut persepsi masyarakat yang terdiri dari enam komponen yaitu: Transparansi, Responsif, Akuntabel, Partisipatif, Terukur Efisien, Efektif, Berkelanjutan dan Berkeadilan. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen/variabel pengukuran IKUPD pada Indeks Perencanaan

Pembangunan Daerah (IPPD) Kabupaten Temanggung 2022. Berikut penjabaran tabel deskripsi pengukuran pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2023:



Gambar 5 Kerangka IPPN

Sumber: Bappenas, 2018

Tabel 4. Deskripsi Pengukuran Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Variabel	Indikator Penyusun Sub Variabel	Definisi	Cara Perhitungan	Referensi	Kebutuhan Data	Sumber Data	PD Pengampu Utama
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Integrasi	Keselarasn RKPd Kabupaten dengan RPJMD Kabupaten	Rata-rata Prosentase muatan RKPd yang sesuai dengan RPJMD Kab. Temanggung	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2018)	Data Sekunder: 1. % Keselarasn RKPd Kabupaten dengan RPJMD Kabupaten 2. Analisis output, outcome, dan dampak	Bidang Evaluasi, Bappeda Kab. Temanggung	Bappeda Kab. Temanggung
	Sinkronisasi	Keselarasn Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten	Rata-rata Prosentase muatan Renja PD yang sesuai dengan Renja Kab. Temanggung	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2018)	Data Sekunder: 1. % Keselarasn Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten 2. Analisis output, outcome, dan dampak	Bidang Evaluasi, Bappeda Kab. Temanggung	Bappeda Kab. Temanggung
	Sinergisitas	Keselarasn muatan program strategis nasional tahunan (terkait Kab. Temanggung) dan Program Strategis Renja Kab. Temanggung tahunan	Rata-rata Prosentase muatan Program Strategis Nasional yang sesuai dengan Program Strategis Renja	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2018)	Data Sekunder: 1. % Keselarasn muatan program strategis nasional tahunan (terkait Kab. Temanggung) dan Program Strategis Renja Kab. Temanggung	Bidang Evaluasi, Bappeda Kab. Temanggung	Bappeda Kab. Temanggung

			Kab. Temanggung		tahunan 2. Analisis output, outcome, dan dampak		
		Keselarasn muatan program strategis provinsi tahunan (terkait Kab. Temanggung) dan Program Strategis Renja Kab. Temanggung tahunan	Rata-rata Prosentase muatan Program Strategis Provinsi yang sesuai dengan Program Strategis Renja Kab. Temanggung	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2018)	Data Sekunder: 1. % Keselarasn muatan program strategis provinsi tahunan (terkait Kab. Temanggung) dan Program Strategis Renja Kab. Temanggung tahunan 2. Analisis output, outcome, dan dampak	Bidang Evaluasi, Bappeda Kab. Temanggung	Bappeda Kab. Temanggung
Proses dan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah	Transparan	“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.	Perhitungan Likert 1-5 Survei Primer	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persepsi Masyarakat terkait Transparansi Produk Perencanaan Kab. Temanggung	Keterwakilan Kelompok Bidang, Perwakilan DPRD per Dapil dan Perwakilan kecamatan	Bappeda Kab. Temanggung

	Responsif	“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.	Perhitungan Likert 1-5 Survei Primer	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persepsi Masyarakat terkait Responsif Produk Perencanaan Kab. Temanggung	Keterwakilan Kelompok Bidang, Perwakilan DPRD per Dapil dan Perwakilan kecamatan	Bappeda Kab. Temanggung
	Akuntabilitas	“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perhitungan Likert 1-5 Survei Primer	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persepsi Masyarakat terkait Akuntabel Produk Perencanaan Kab. Temanggung	Keterwakilan Kelompok Bidang, Perwakilan DPRD per Dapil dan Perwakilan kecamatan	Bappeda Kab. Temanggung
	Partisipatif	“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi	Perhitungan Likert 1-5 Survei Primer	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan	Persepsi Masyarakat terkait Partisipatif Produk Perencanaan Kab. Temanggung	Keterwakilan Kelompok Bidang, Perwakilan DPRD per Dapil	Bappeda Kab. Temanggung

		untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.		Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		dan Perwakilan kecamatan	
	Terukur	“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.	Perhitungan Likert 1-5 Survei Primer	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persepsi Masyarakat terkait Terukur Produk Perencanaan Kab. Temanggung	Keterwakilan Kelompok Bidang, Perwakilan DPRD per Dapil dan Perwakilan kecamatan	Bappeda Kab. Temanggung
	Efisien	“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.	Perhitungan Likert 1-5 Survei Primer	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persepsi Masyarakat terkait Efisien Produk Perencanaan Kab. Temanggung	Keterwakilan Kelompok Bidang, Perwakilan DPRD per Dapil dan Perwakilan kecamatan	Bappeda Kab. Temanggung

	Efektif	“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.	Perhitungan Likert 1-5 Survei Primer	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persepsi Masyarakat terkait Efektif Produk Perencanaan Kab. Temanggung	Keterwakilan Kelompok Bidang, Perwakilan DPRD per Dapil dan Perwakilan kecamatan	Bappeda Kab. Temanggung
	Berkeadilan	“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.	Perhitungan Likert 1-5 Survei Primer	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persepsi Masyarakat terkait Berkeadilan Produk Perencanaan Kab. Temanggung	Keterwakilan Kelompok Bidang, Perwakilan DPRD per Dapil dan Perwakilan kecamatan	Bappeda Kab. Temanggung

Sumber: Analisis Penyusun, 2023.

3.3. Metode Analisis

Sebagian besar analisis hingga menghasilkan 6 keluaran dalam kegiatan ini dilakukan secara deskriptif, dengan spesifikasi sebagai berikut.

- **Keluaran 1:** Definisi, ukuran, dan kriteria yang kontekstual.
Analisis deskriptif ditujukan untuk membangun ukuran dan kriteria pada empat indikator terpilih, mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku maupun dokumen lain yang menjadi sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa dokumen acuan yang digunakan, antara lain: Permen PAN Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, serta beberapa dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau lainnya untuk melengkapi.
- **Keluaran 2:** Data Penunjang Penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023
Analisis deskriptif menjadi yang utama digunakan dalam penyusunan data dasar tersebut. Selain itu, kebutuhan untuk menilai atau mengukur capaian tertentu dilakukan secara kuantitatif menggunakan rumus yang sesuai untuk mengukur tiap-tiap variabel.
- **Keluaran 3:** Hasil Analisis Capaian; yang berisi Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, yang di dalamnya mencakup indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*)
Penilaian indeks dilakukan berdasarkan input data dari pemerintah terkait indikator keluaran (*output*) yang berasal dari data mengenai berbagai kegiatan pembangunan terkait indikator perencanaan pembangunan daerah, serta indikator hasil (*outcome*) yang berasal dari data respon dan persepsi masyarakat terkait dampak yang diterima dan dirasakan terkait kegiatan pembangunan pada indikator tersebut.
- **Keluaran 4:** Evaluasi Perubahan Nilai; yang berisi Hasil evaluasi perubahan nilai dari indeks terkait yang telah dibandingkan dengan nilai sejak tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai dari indikator perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 dengan nilai sejak tahun 2021. Hasil review adalah *trend/kecenderungan* dari indikator terpilih pada 2 tahun terbaru.
- **Keluaran 5:** Review kegiatan dan program pembangunan tahun 2023 terkait indeks perencanaan pembangunan daerah
Review dilakukan dengan menganalisis kegiatan dan program pembangunan tahun 2022-2023 yang berkaitan dengan indeks perencanaan pembangunan daerah. Review yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan indikator tersebut
- **Keluaran 6** Rekomendasi Kegiatan Pembangunan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi kegiatan pembangunan yang mencakup usulan kegiatan dan program yang dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai IKU.

3.4. Metode Survei dan Desain Survei Pengukuran dan Penilaian IKUPD

Metode yang digunakan selama kegiatan survei dilakukan dengan: metode pengumpulan data, penentuan sampel responden, dan penilaian indeks. Adapun Desain Survei dapat dilihat pada Lampiran. Penjelasan tentang metode survei dalam kegiatan ini dapat dilihat sebagai berikut.

3.4.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini berasal dari data primer maupun sekunder. Pada tahap awal, data sekunder diperlukan untuk membangun kriteria dan ukuran, yang bersumber dari berbagai dokumen Peraturan ataupun dokumen teoritis lain yang mendukung. Di samping itu, data sekunder ini juga sangat diperlukan dalam rangka penyusunan data dasar untuk mengidentifikasi kondisi Kabupaten Temanggung pada indeks perencanaan pembangunan daerah. Data ini diperoleh dari berbagai dokumen yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (PD) maupun dokumen rencana serta informasi dari Badan Statistik. Selain itu, penilaian kinerja pada indikator *output* juga membutuhkan ketersediaan data sekunder berupa informasi target dan capaian pelaksanaan program/kegiatan. Kebutuhan data tersebut dapat dilengkapi dengan mengakses berbagai dokumen strategis daerah.

Data primer diperlukan untuk memperoleh informasi dalam menganalisis indikator *output* maupun *outcome*. Data ini diperoleh melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kegiatan FGD difokuskan untuk menyampaikan, memverifikasi, serta menggali masukan dari narasumber terpilih. Berbeda halnya dengan kegiatan wawancara yang dilakukan untuk eksplorasi informasi yang diperlukan untuk merumuskan hasil kegiatan. Ada dua tipe narasumber dalam wawancara tersebut, yakni PD sebagai narasumber dalam mengeksplorasi indikator *output*, serta masyarakat yang menjadi narasumber untuk eksplorasi indikator *outcome*. Penentuan responden dalam wawancara ini, baik dari sisi Pemerintah maupun masyarakat, menggunakan jenis *Purposive Sampling*.

3.4.2. Populasi dan Sampel

Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah penerima manfaat dari proses perencanaan adalah perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan produk perencanaan Kabupaten Temanggung. Perwakilan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan tersebut terbagi kedalam tiga kelompok yaitu perwakilan kecamatan dalam musrenbang, Perwakilan anggota DPRD berdasarkan Daerah Pemilihan dan Perwakilan Bidang Urusan. Pada survei primer untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah ini akan dilakukan dengan responden populasi karena dapat secara objektif mengukur performa pelayanan terkait proses perencanaan Kabupaten Temanggung. Berikut penjabaran responden Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada tiap kelompoknya:

Tabel 5. Sampel Survei Primer Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kelompok Keterwakilan	Jumlah Responden
1	Perwakilan kecamatan dalam musrenbang	20 Responden (1 @kecamatan)
2	Perwakilan DPRD berdasarkan Daerah pemilihan	4 Responden (1 @daerah pemilihan)

3	Keterwakilan bidang	21 Responden (1 @ kelompok bidang)
Total Responden		45 Responden

3.4.3. Survei pengumpulan data sekunder: informasi penyusun data dasar, serta Identifikasi pelaksanaan program/kegiatan PD, target, dan capaian

Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dengan fokus pencarian antara lain: (a) Informasi kondisi penilaian variabel untuk data penilaian IKUPD 2023; (b) Program/Kegiatan yang dilaksanakan PD yang mendukung pencapaian variabel (berikut informasi terkait target dan capaiannya). Bentuk informasi yang diperoleh dapat berupa dokumen (*hardcopy*) ataupun file (*softcopy*). Survei ini dilaksanakan selama dua minggu oleh satu atau dua orang surveyor yang berasal dari tim Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Temanggung. Bentuk kegiatan survei ini mencakup pencarian dokumen, telaah kesesuaian isi dengan kebutuhan data, serta penggandaan (diusahakan dalam bentuk *softcopy* file).

Tabel 6. Panduan Survei Pengumpulan Data Sekunder

KEGIATAN	INPUT		OUTPUT	SASARAN RESPONDEN				PELAKSANA & TANGGUNGJAWAB
	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA		BASIS ACUAN	JUMLAH SAMPEL	JENIS	JUMLAH TOTAL	
5) Survei pengumpulan data sekunder: informasi penyusun data penilaian, serta rencana dan pelaksanaan program/kegiatan PD, target, dan capaiannya	<i>Data sekunder:</i> Informasi kondisi penilaian variabel untuk data dasar Rencana dan pelaksanaan program/kegiatan OPD, target, dan capaian	Dokumen BPS RPJMD Renstra, Renja, dan LAKIP OPD Dokumen strategis lain yang relevan	Data sekunder: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi kondisi penilaian variabel untuk data dasar; ▪ Rencana dan pelaksanaan program/kegiatan PD, target, dan capaian 	1)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen BPS • RPJMD • Renstra, Renja, dan LAKIP PD • Data Pokok PD • Dokumen strategis lain yang relevan 	18	Tim Litbang Bappeda (1-2 orang full)

3.4.4. Survei pengumpulan data primer: data penunjang perumusan data dasar dan penilaian variabel kinerja pada indikator *output* dan *outcome*

Kegiatan survei pengumpulan data primer terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang mendukung penilaian untuk indikator *output* dan indikator *outcome*. Dalam kegiatan ini, narasumber untuk indikator *output* berasal dari Perangkat Daerah, sedangkan narasumber pada indikator *outcome* berasal dari masyarakat.

A. Penilaian Indikator *output*: informasi Pelaksanaan program/kegiatan (tingkat capaian dan kendala)

Survei ini merupakan kegiatan 6, dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung. Survei dilakukan melalui wawancara pada target narasumber yakni Kepala atau Staf di bidang pengampu Pelaksanaan Program/Kegiatan di setiap PD. Detail kebutuhan informasi yang akan dicari dalam survei ini mengacu pada hasil perolehan data pada Hasil Survei Kegiatan 4, dengan fokus pertanyaan di antaranya adalah:

1. Identifikasi program/kegiatan (pada 2022-2023) yang mendukung pencapaian variabel.
Titik kritis: kemungkinan adanya program/kegiatan yang secara tidak langsung memiliki efek terhadap pencapaian variabel.
2. Identifikasi target pada tiap sub variabel (mengacu data penilaian IKUPD 2021 pada tiap variabel).
3. Identifikasi rekomendasi program/kegiatan yang mendukung pencapaian target pada tahun depan.

Secara spesifik, detail pertanyaan dan form survei pada kegiatan ini dapat dirumuskan setelah melaksanakan survei kegiatan 4. Hal ini dikarenakan hasil survei tersebut yang menjadi bahan untuk eksplorasi lebih lanjut terkait rencana dan pelaksanaan program/kegiatan PD, serta rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan nilai indeks IKUPD tahun mendatang. Untuk form kuesioner survei kegiatan ini akan disusun per sasaran PD serta konten pertanyaan dalam kuesioner mengacu pada variabel dan data penilaian IKUPD 2024.

B. Penilaian Indikator Outcome: Identifikasi Capaian Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Data Dasar

Kegiatan survei pengumpulan data primer penunjang penilaian pada indikator *outcome* berfokus pada identifikasi capaian pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat. Terkait hal tersebut, maka sasaran responden pada survei kegiatan 5 ini adalah masyarakat, yang dalam hal ini difokuskan pada Perwakilan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan tersebut terbagi kedalam tiga kelompok yaitu perwakilan kecamatan dalam musrenbang, Perwakilan anggota DPRD berdasarkan Daerah Pemilihan dan Perwakilan Bidang Urusan. Survei kegiatan 5 pada indikator *outcome* ini dilakukan dengan metode pengisian kuesioner. Detail kebutuhan informasi yang akan dicari dalam survei ini mengacu pada hasil perolehan data pada tabel Hasil Survei Kegiatan 4, dengan fokus pertanyaan di antaranya mengarah pada informasi:

1. Identifikasi kondisi yang menggambarkan penilaian pada tiap sub variabel yang mengacu pada indikator *outcome*.

2. Bagaimana pelaksanaan program/kegiatan yang termasuk berhasil mencapai target, dan sebaliknya.

Tabel 7. Panduan Survei Pengumpulan Data Primer

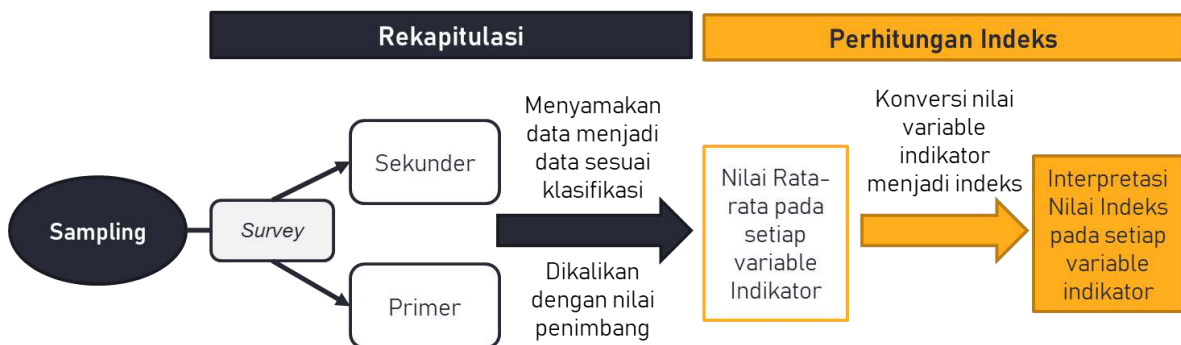
KEGIATAN	INPUT		OUTPUT	SASARAN RESPONDEN				PELAKSANA & TANGGUNGJAWAB
	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA		BASIS ACUAN	JUMLAH SAMPEL	JENIS	JUMLAH TOTAL	
6) Survei pengumpulan data primer: data penunjang perumusan data dasar dan penilaian variabel kinerja pada indikator <i>output</i> dan <i>outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> Data primer penunjang perumusan data dasar dan penilaian indikator <i>output</i>: informasi Pelaksanaan program/kegiatan (tingkat capaian dan kendala) 	PD di Kabupaten Temanggung Masyarakat	Data primer penunjang perumusan data dasar dan penilaian variabel kinerja pada indikator <i>output</i> dan <i>outcome</i>	1)Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4)Dinas Kesehatan 5)Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8)Dinas Sosial 9)Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 10)Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 org	<ul style="list-style-type: none"> Bid. Perencanaan Bid. Pelaksanaan Prog/Keg. 		

KEGIATAN	INPUT		OUTPUT	SASARAN RESPONDEN			PELAKSANA & TANGGUNGJAWAB	
	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA		BASIS ACUAN	JUMLAH SAMPEL	JENIS		JUMLAH TOTAL
				11)Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12)Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13)Dinas Penanaman Modal 14)Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, 15)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 16)Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17)Badan Pusat Statistik 18)Kepolisian Resort Temanggung				

KEGIATAN	INPUT		OUTPUT	SASARAN RESPONDEN				PELAKSANA & TANGGUNGJAWAB
	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA		BASIS ACUAN	JUMLAH SAMPEL	JENIS	JUMLAH TOTAL	
	<ul style="list-style-type: none"> Data primer penunjang perumusan data dasar dan penilaian indikator <i>outcome</i>: informasi pemanfaatan hasil pelaksanaan program/kegiatan (tinjauan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat/kelompok Masyarakat penerima manfaat Perangkat Desa 	Data primer penunjang perumusan data penilaian IKU 2022 dan penilaian variabel kinerja pada indikator <i>outcome</i>	20 kecamatan	110 Responden	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan dari BPD yang sudah ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan agama 	110 org	Tim Litbang Bappeda (1 org per 1 atau bisa langsung 2 Kecamatan untuk wawancara dan rekap hasil)
				Sampel Kecamatan	60 responden	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan dari Sekretaris Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di setiap desa 	60 org	Tim Litbang Bappeda (1 org per 1 atau bisa langsung 2 Kecamatan untuk wawancara dan rekap hasil)
				Pelaku Usaha	35 responden	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan dari UMKM Perwakilan dari Usaha Besar Perwakilan dari Tenaga Kerja 	35 org	Tim Litbang Bappeda (1 org per 1 atau bisa langsung 2 Kecamatan untuk wawancara dan rekap hasil)
				<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPRD Kab. Temanggung Perwakilan Kelompok Masyarakat Perwakilan Masyarakat berdasarkan kewilayahan/ Perwakilan LKMD/ LPMK di tingkat Kecamatan 	45 responden	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPRD Kab. Temanggung Perwakilan Kelompok Masyarakat Perwakilan Masyarakat berdasarkan kewilayahan/ Perwakilan LKMD/ LPMK di tingkat Kecamatan 	45 org	Tim Litbang Bappeda (1 org per 1 atau bisa langsung 2 Kecamatan untuk wawancara dan rekap hasil)

3.4.5. Metode Pengukuran Hasil Survei

Tahapan pengukuran hasil survei diawali dengan tahapan sampling untuk menentukan jumlah responden yang dituju. Selanjutnya yaitu rekapitulasi data yang dilakukan dengan merangkum seluruh data yang dihasilkan dari survei yang dilakukan baik untuk data sekunder maupun data primer maupun data sekunder. Kemudian, dilakukan penyamaan satuan data yang di dapatkan dari hasil survei sekunder maupun primer menjadi data ordinal dengan menggunakan skala likert. Kategori yang skala likert yang digunakan yaitu dengan skala 1-5. Pada kegiatan pengskalaan ini tidak digunakan nilai tengah, hal ini dikarenakan nilai tengah tersebut dapat berpengaruh pada objectivitas penilaian yang dilakukan. Penentuan kategori akan disusun melihat setelah data hasil survei diperoleh. Penjelasan mengenai tahapan tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut ini:



Gambar 6. Kerangka Alur Pengukuran Indeks

Sumber: Adaptasi: Keputusan Men-PAN No. 25 Tahun 2004 (Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat)

Tahapan selanjutnya adalah teknik pengolahan data yang mengadaptasi Keputusan Men-PAN No. 25 Tahun 2004 mengenai pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Penentuan nilai penimbang pada masing-masing variabel di setiap indikator dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai penimbang indikator } x = \frac{1}{\text{Jumlah variabel/indikator}}$$

2. Menentukan nilai variabel pada setiap indikator dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai indeks setiap indikator } x = \text{Nilai setiap variable indikator} \times \text{Nilai Penimbang}$$

3. Tahapan selanjutnya yaitu dengan menentukan kriteria indeks pada setiap variabel. Pada tahapan ini dilakukan konversi dari nilai indeks antara 25-100, untuk itu nilai dasar konversi yang digunakan adalah 25.

$$\text{Nilai indeks setiap indikator } x = \text{Nilai setiap variabel indikator} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut sehingga dapat dibuat kategori dan interval pada setiap variabel indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Indeks Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKU	Nilai Interval Konversi IKU	Interpretasi Kinerja IKU
1	<1.80	<20%	Tidak Baik
2	1.81-2.60	21-40%	Kurang Baik
3	2.61-3.40	41-60%	Cukup
4	3.41-4.20	61-80%	Baik
5	4.21-5.00	>80%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Adaptasi Keputusan Menteri PAN No.25 Tahun 2004: Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

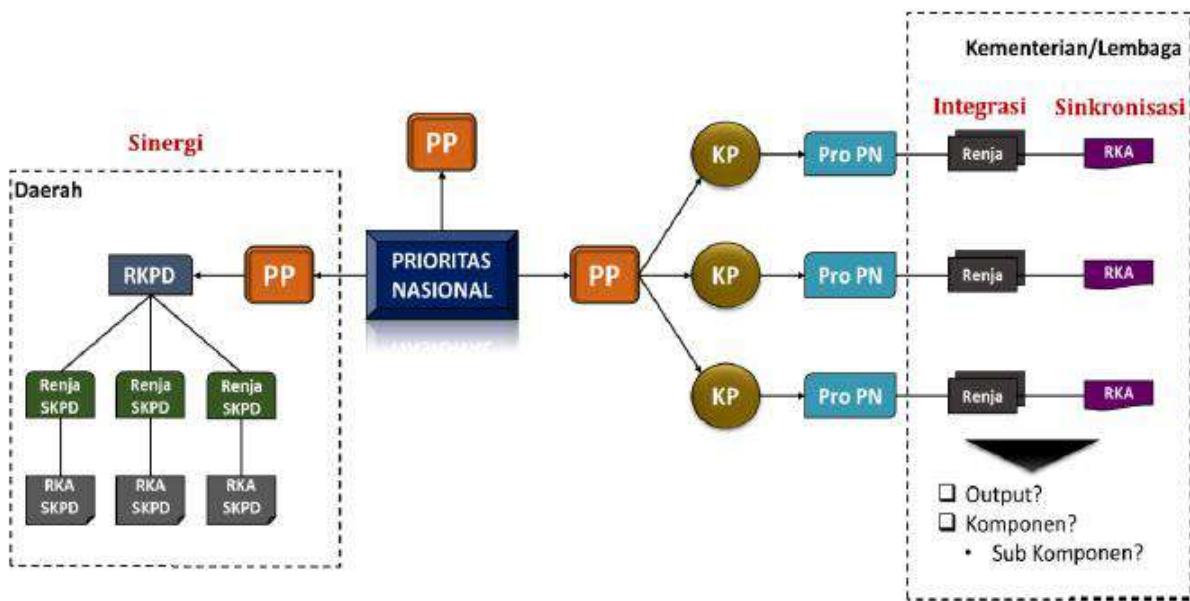
3.4.6. Kompilasi dan Verifikasi Hasil Survei

Pada analisis *outcome*, hasil dari form wawancara, dan FGD yang dilakukan pada instansi penyedia data serta masyarakat dikompilasikan. Hasil kompilasi dapat dilakukan perbandingan antar data dan dengan data tahun lalu. Hasil kompilasi tersebut akan diverifikasi apabila data yang ada kosong/ terdapat gap signifikan dibanding tahun lalu/ kesalahan teknis dan substansi lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan normalitas data yang digunakan, sehingga pada perbandingan dan review nilai didapat interpretasi yang mendekati kondisi real.

Pada analisis *Output*, hasil dari kebutuhan data berupa program yang terkait akan diperbandingkan dengan hasil nilai outcome. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kinerja utama pada indikator tersebut, sehingga dapat menjadi rujukan rekomendasi kedepan. Verifikasi diperlukan untuk memastikan program yang berjalan dan yang direkomendasikan kedepan sesuai dengan konteks pada indikator kinerja utama. Hal ini akan menjamin keberlanjutan dari program kegiatan dan sesuai dengan sasaran pembangunan yang diharapkan.

PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH; INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi kunci. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga tercipta produk pembangunan yang tepat sasaran.



Gambar 7 Kerangka Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Bappenas, 2018

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu ukuran Indeks Kinerja Utama Bappenas yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini dirumuskan empat aspek utama yaitu:

- Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN.
- Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN.
- Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN.
- Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.

Inti komponen dari keempat aspek tersebut adalah adanya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan sinkron.

Tabel 9 Hasil IPPN 2018

IKU Menteri	Bridging Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	IKU UKE I/II	Total Capaian IKU UKE I	Total Capaian IKU Menteri
% Keselarasan rencana pembangunan dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah	Capaian Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2019	% Keselarasan Muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	99,91%
		% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L dengan RKP 2019	99,74%	
	Capaian Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2019	% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2019	100%	

Sumber: Bappenas, 2018

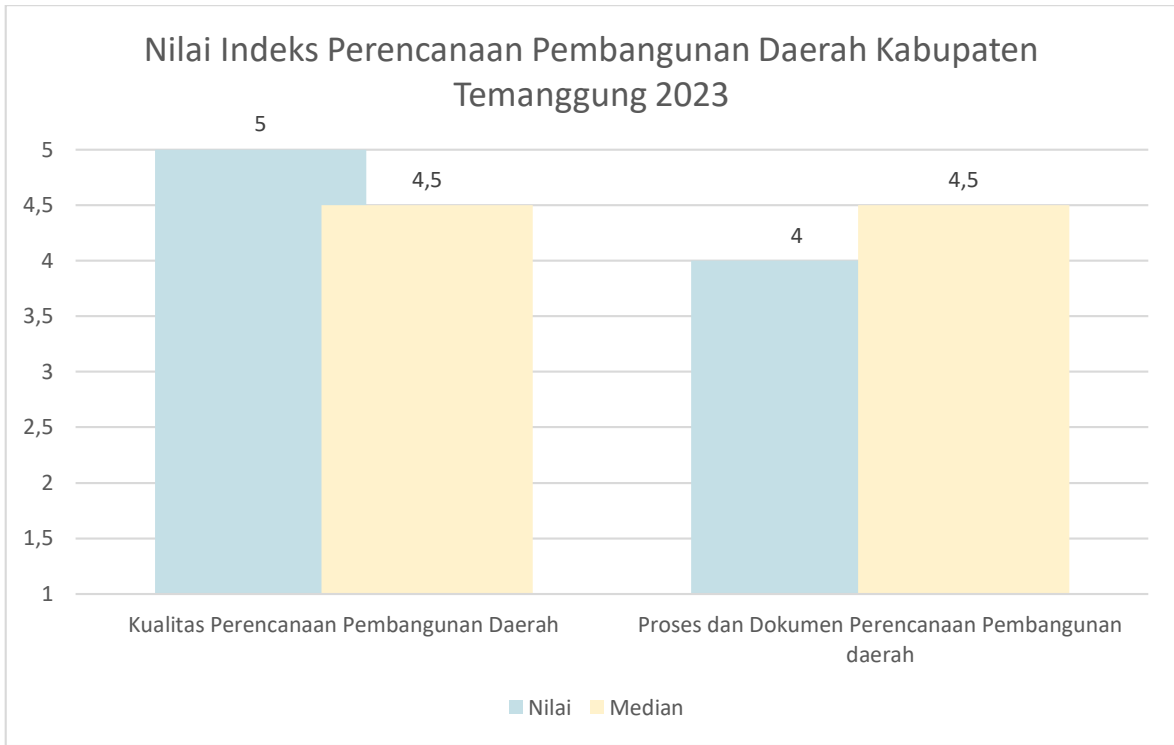
Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian integrasi, sinkronisasi, maupun sinergitas yang mencapai IKU sudah sangat baik dan terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini mengindikasikan sudah adanya sistem yang baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat. Hasil pengukuran ini juga mengindikasikan kualitas produk perencanaan yang saling terkait satu sama lainnya sehingga pada saat pengukuran akhir dapat diketahui gambaran capaian Secara lebih komprehensif dan sesuai dengan capaian visi misi nasional yang telah ditetapkan.

Variabel Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup sub variabel Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sudah mencapai angka maksimal. Adapun variabel proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup sub variabel Transparan, Responsif, Partisipatif, Terukur, Efisien, Efektif, Berkeadilan dan Berkelanjutan memiliki nilai 3,75

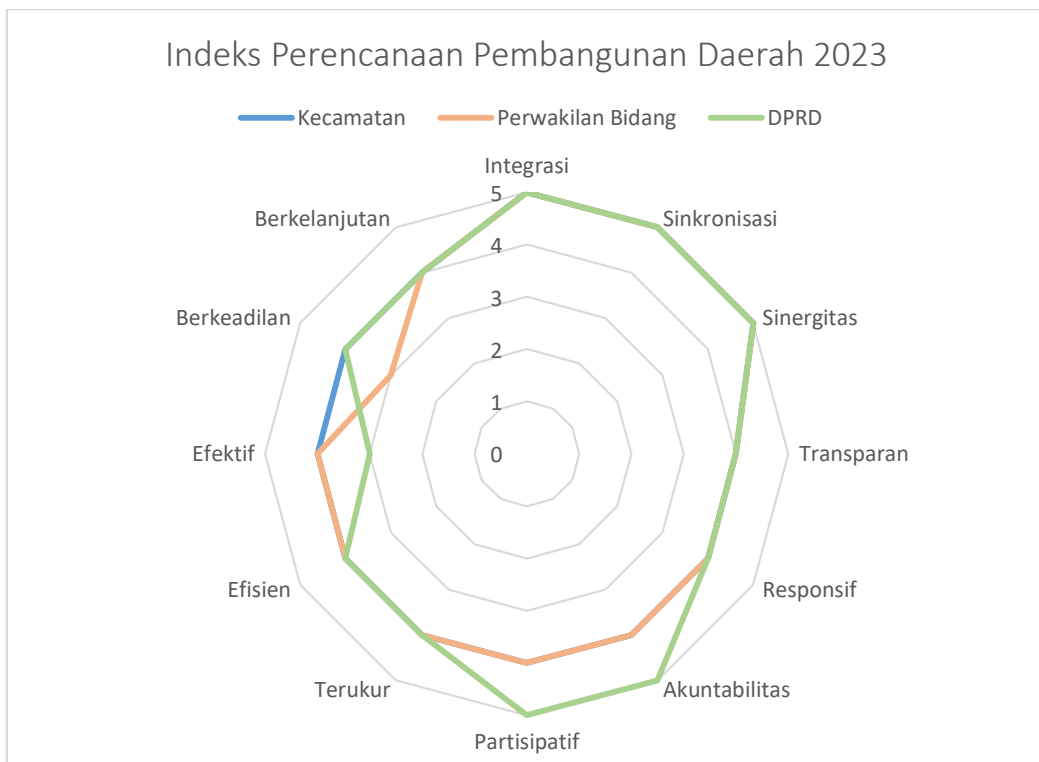
Tabel 10 Hasil Indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Variabel	Nilai	Bobot	Nilai Sub-Variabel	Total Nilai Sub-Variabel
1.1	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	5,00	0,50	2,50	4,50
1.1.1	Integrasi	5,00			
1.1.2	Sinkronisasi	5,00			
1.1.3	Sinergitas	5,00			
1.2	Proses dan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah	4,00	0,50	2,00	
1.2.1	Transparan	4,00			
1.2.2	Responsif	4,00			
1.2.3	Akuntabilitas	4,00			
1.2.4	Partisipatif	4,00			
1.2.5	Terukur	4,00			

1.2.6	Efisien	4,00			
1.2.7	Efektif	4,00			
1.2.8	Berkeadilan	4,00			
1.2.9	Berkelanjutan	4,00			

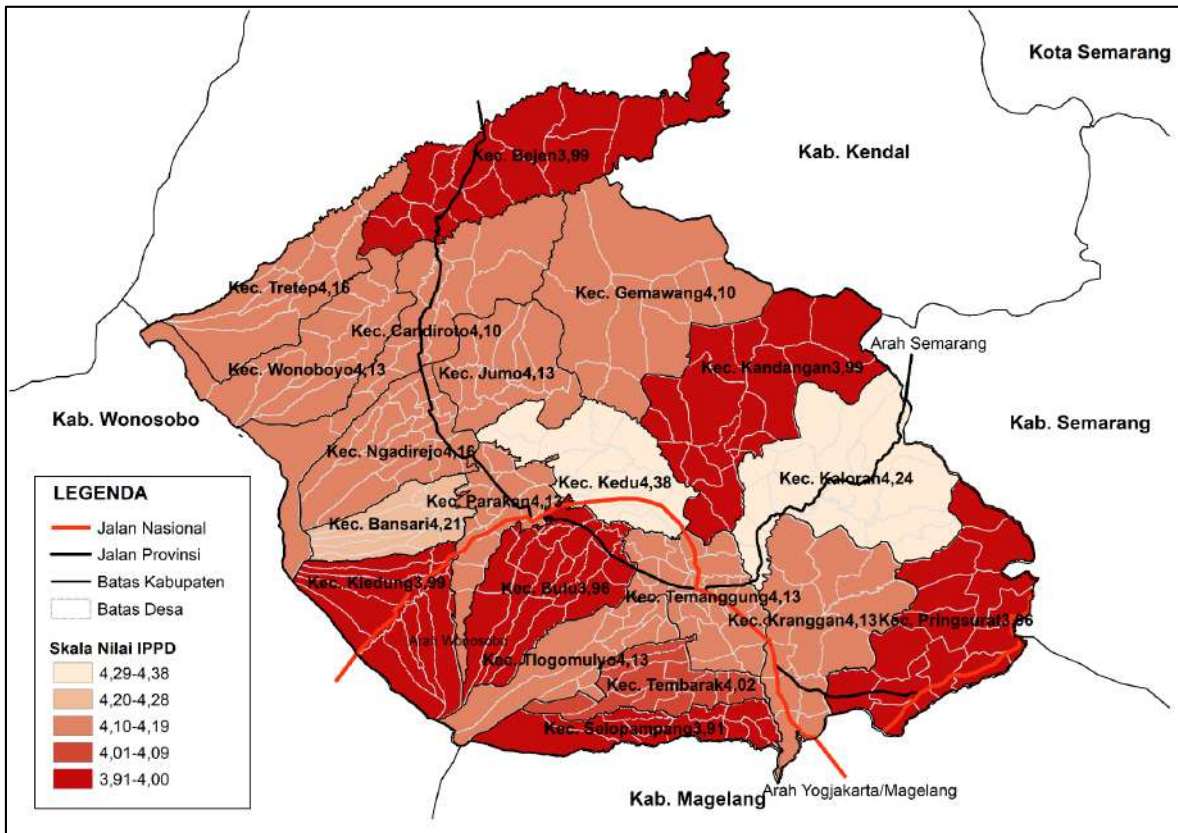


Gambar 8 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Gambar 9 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Per Jenis Responden

Kecamatan dengan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tertinggi di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Kranggan dengan nilai 4,83 dan terendah adalah Kecamatan Selopampang dengan nilai 3,72. Terdapat 16 kecamatan (Kecuali Kecamatan Selopampang, Kedu, Bansari dan Tembarak) yang memiliki nilai dengan kategori Sangat Baik

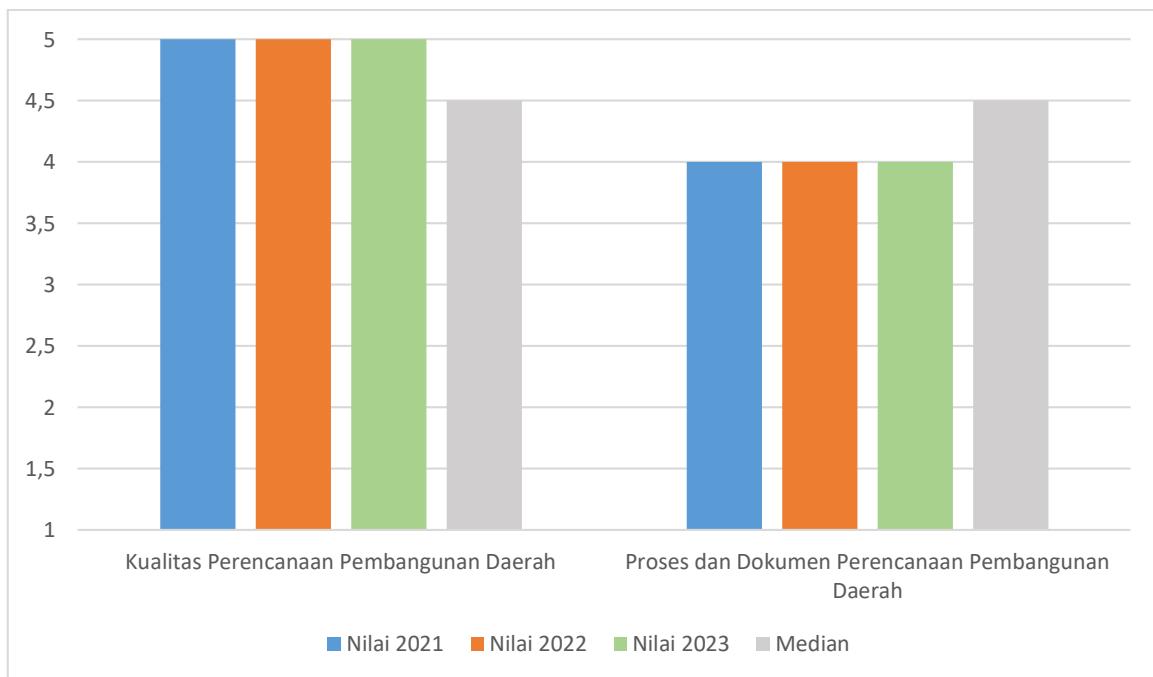


Gambar 10 Peta Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Per Kecamatan

REVIEW PENILAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

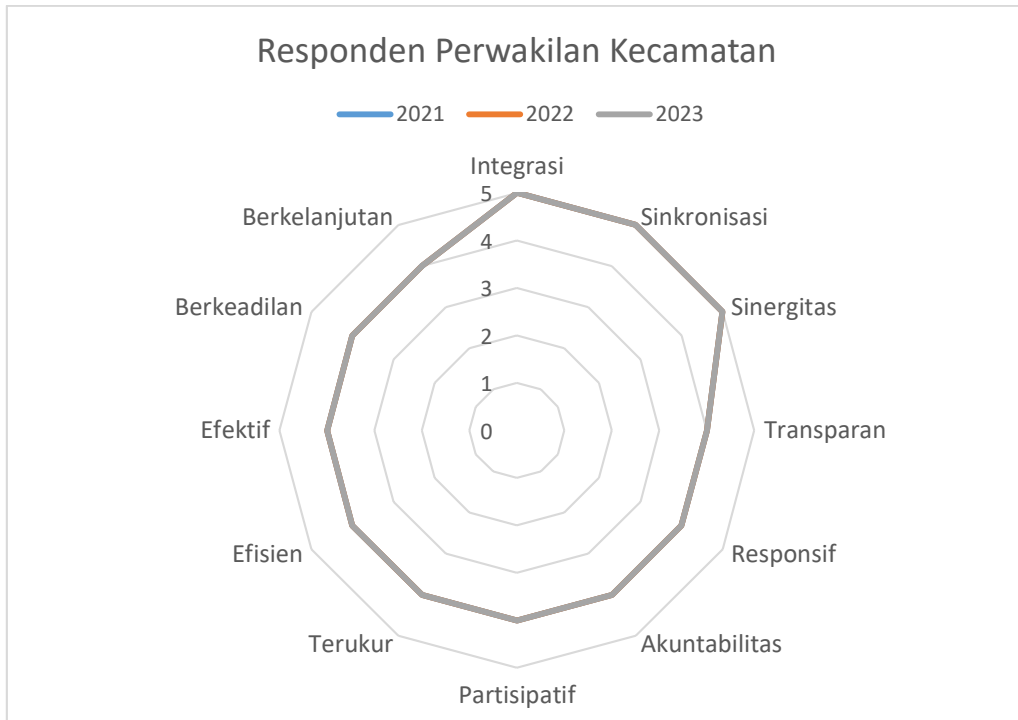
5.1. Review Pada Penilaian Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami stagnansi nilai selama rentang tahun 2021 hingga 2023. Adapun variabel kualitas perencanaan pembangunan daerah mampu dipertahankan pada nilai 5, sementara variabel proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tetap memiliki nilai 4. Upaya peningkatan perlu dilakukan pada variabel proses dan dokumen perencanaan dengan mengedepankan beberapa aspek seperti transparan, responsif, akuntabilitas, partisipatif, terukur, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.



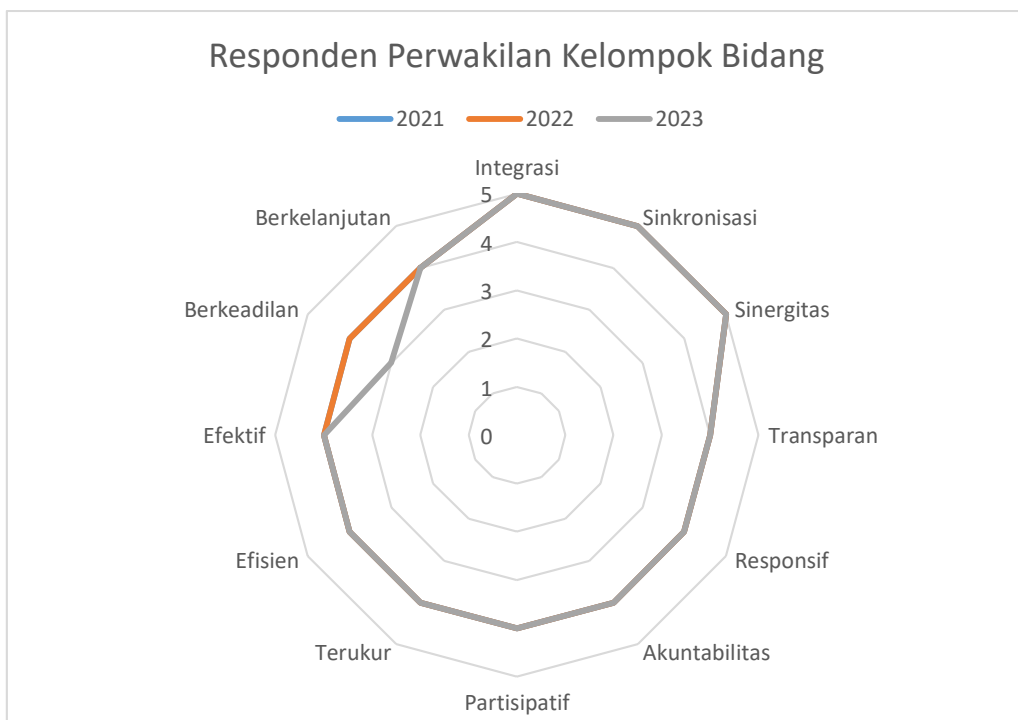
Gambar 11. Perbandingan Penilaian pada Variabel Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada responden perwakilan masyarakat peserta musrenbang seluruh aspek mengalami stagnansi nilai sejak tahun 2021. Perubahan responen juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai indeks perencanaan pembangunan daerah.



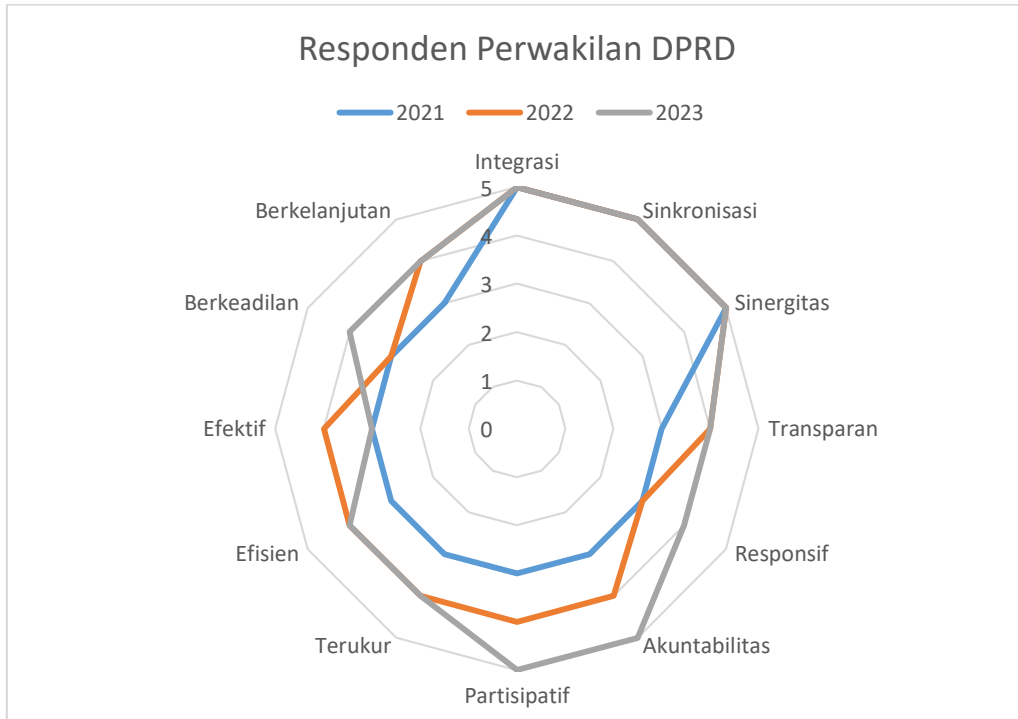
Gambar 12. Jawaban Responden Perwakilan Kecamatan

Pada responden perwakilan bidang seluruh aspek mengalami stagnansi nilai sejak tahun 2021, kecuali sub variabel Berkeadilan. Sub variabel Berkeadilan mengalami penurunan nilai pada tahun 2023, dari 4 menuju 3. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penurunan sub variabel tersebut yaitu prioritas pembangunan wilayah yang belum optimal serta masih adanya kelompok-kelompok yang kurang dilibatkan dalam pembangunan contohnya adalah kelompok difabel.



Gambar 13. Jawaban Responden Perwakilan Kelompok Bidang

Pada responden perwakilan DPRD seluruh aspek mengalami trend peningkatan sejak tahun 2021, kecuali sub variabel Efektif. Sub variabel Efektif mengalami penurunan nilai pada tahun 2023 dari 4 menuju 3, dan secara umum masih mengalami fluktuasi nilai. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penurunan sub variabel tersebut yaitu efektivitas serapan aspirasi masyarakat untuk kegiatan perencanaan dan pembangunan.



Gambar 14. Jawaban Responden Perwakilan DPRD

5.2. Review Status Capaian Target dan Program/Kegiatan Pembangunan

Pada bagian ini terlampir adalah review status capaian target indeks perencanaan pembangunan daerah. Capaian ini dilihat berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu terlampir juga program/kegiatan pendukung indeks, serta rekomendasi program/kegiatan yang dapat meningkatkan nilai pada masa yang akan datang.

Tabel 11 Review Status Capaian Target dan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

Variabel	Sub Variabel	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai Kumulatif 2022	Nilai Kumulatif 2023	Target 2022	Target 2023	Interpretasi	Review Hasil Penilaian	Program/ Kegiatan yang berkontribusi	Rekomendasi
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Integrasi	5	5	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Pada tahun 2022-2023 87% program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung telah terintegrasi dengan program dan kegiatan pada RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>
	Sinkronisasi	5	5	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Pada tahun 2022-2023 rata-rata 94% program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung telah tersinkronisasi, yang mencakup tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia, sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sub bidang ekonomi dan sumber daya alam, sub bidang infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>

	Sinergitas	5	5	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Pada tahun 2022-2023 secara umum telah tercapai sinergi antara program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>
Proses dan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah	Transparan	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Hasil survei menunjukkan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab. Temanggung menjawab "Transparansi" Produk Perencanaan Pemerintah Daerah adalah "Baik" (3,76) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>
	Responsif	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Hasil survei menunjukkan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah

									<p>Temanggung menjawab "Responsif" Produk Perencanaan Pemerintah Daerah adalah "Baik" (3,72) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)</p>	<p>2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan</p> <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>	<p>2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan</p> <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>
	Akuntabilitas	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	<p>Nilai sama (Target Tercapai)</p>	<p>Hasil survei menunjukkan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab. Temanggung menjawab "Akuntabel" Produk Perencanaan Pemerintah Daerah adalah "Baik" (3,80) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)</p>	<p>1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan</p> <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>	<p>1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan</p> <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>
	Partisipatif	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	<p>Nilai sama (Target Tercapai)</p>	<p>Hasil survei menunjukkan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab. Temanggung menjawab "Partisipatif" Produk Perencanaan</p>	<p>1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan</p>	<p>1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan</p>

									Pemerintah Daerah adalah "Baik" (4,02) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)
	Terukur	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Hasil survei menunjukan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab. Temanggung menjawab "Terukur" Produk Perencanaan Pemerintah Daerah adalah "Baik" (3,65) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>
	Efisien	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Hasil survei menunjukan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab. Temanggung menjawab "Efisien" Produk Perencanaan Pemerintah Daerah adalah "Baik" (3,74) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan <p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)</p>

	Efektif	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Hasil survei menunjukkan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab. Temanggung menjawab "Efektif" Produk Perencanaan Pemerintah Daerah adalah "Baik" (3,76) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan <p>Program monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan untuk menunjang efektivitas perencanaan</p>
	Berkeadilan	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Hasil survei menunjukkan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab. Temanggung menjawab "Berkeadilan" Produk Perencanaan Pemerintah Daerah adalah "Baik" (3,57) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Penelitian dan Kelitbangan <p>Program penelitian dan pengembangan prioritas untuk daerah tertinggal dan kelompok masyarakat rentan</p>
	Berkelanjutan	4	4	4,5	4,5	4,2	4,3	Nilai sama (Target Tercapai)	Hasil survei menunjukkan kondisi saat rata-rata masyarakat di Kab. Temanggung menjawab "Berkelanjutan"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

									Produk Perencanaan Pemerintah Daerah adalah "Baik" (3,74) dari kondisi ideal Sangat Baik (5,00)	3. Program Penelitian dan Kelitbangan	3. Program Penelitian dan Kelitbangan Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi Berbasis Online (Pemantaban nilai)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	---

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi penilaian indeks perencanaan pembangunan daerah kepada stakeholder mitra

Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung melibatkan banyak stakeholder mitra, diantaranya masyarakat, perwakilan kelompok bidang dan perwakilan DPRD. Masukan dan saran dari masing-masing stakeholder tersebut perlu dihimpun untuk meningkatkan kualitas dan proses perencanaan.

2. Klasifikasi komponen penilaian

Selama rentang masa penilaian 2021-2023 perlu klasifikasi komponen penilaian. Klasifikasi tersebut dapat berupa:

- Variabel yang harus diperbaiki; adalah variabel yang memiliki nilai di bawah rata-rata
- Variabel yang harus ditingkatkan; adalah variabel yang mengalami stagnansi nilai
- Variabel baru (naik kelas); adalah variabel yang telah mencapai nilai optimal

Klasifikasi ini penting dilakukan untuk menentukan intervensi yang akan dilakukan untuk masing-masing variabel.

3. Penyesuaian prioritas indikator dengan arah pembangunan (RPJMD dan RPJPD)

Kabupaten Temanggung akan memasuki masa penyusunan RPJPD dan RPJMD sejak tahun 2023. Periode penyusunan dan materi dari dokumen tersebut perlu diperhatikan agar terintegrasi dengan indikator yang akan digunakan pada masa perencanaan selanjutnya.

4. Pemanfaatan penilaian IKUPD sebagai *capacity building* bagi PD

Penilaian IKUPD merupakan media *capacity building* bagi perangkat daerah. Melalui penilaian ini perangkat daerah dapat menemukan permasalahan serta solusi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, utamanya terkait pencapaian indikator kinerja. Dengan ini perangkat daerah akan naik kapasitasnya secara perlahan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kebijakan yang diambil

5. Identifikasi sumber-sumber daya yang dapat didayagunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu tantangan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung, Identifikasi dan eksplorasi sumber daya baru perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan yang ada. Harapannya sumber daya baru ini dapat memberikan nilai tambah baik itu pada proses perencanaan maupun hasil perencanaan yang dilakukan.

6. Pembuatan konsep musrenbang yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan

Musrenbang merupakan salah satu media dan tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan banyak stakeholder. Efektivitas, efisiensi dan keadilan dalam proses ini masih diidentifikasi sebagai tantangan. Perlu pembuatan konsep musrenbang baru yang akan lebih optimal dalam pelibatan seluruh stakeholder

7. Internalisasi data, proses, dan sistem penilaian indikator

Data, proses, dan sistem yang sudah dihimpun selama masa perhitungan tahun 2021-2023 perlu diinternalisasi ke dalam masing-masing perangkat daerah. Internalisasi ini penting untuk meningkatkan kemandirian perangkat daerah dalam menilai. Harapannya hal ini dapat meningkatkan kapasitas perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2010. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010, *Klasifikasi Desa Perkotaan dan Pedesaan; Buku I*
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Modal Sosial 2014*
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Modal Sosial 2017*
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Temanggung dalam Angka 2018*
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Temanggung dalam Angka 2020*
- ILOEVAL Unit (2005) dalam *Rantai Nilai Development for Decent Work*, diterbitkan oleh International Labor Organization (ILO), 2009
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2017. *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2004. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25 Tahun 2004: Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat*
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2007. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)*
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara*
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2010. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung pada tahun 2019*
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019*